



MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KECAMATAN GENENG DAN KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

Agus Wiyaka¹, Endang Murti²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

email: aguswiyaka@unmer-madiun.ac.id

ABSTRAK

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Model Implementasi Bantuan Pangan Non tunai dalam rangka Perlindungan Sosial di Kecamatan Geneng dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Pada penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Obyek penelitian adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunia, sedangkan subyek penelitiannya adalah Pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, yang diwakili oleh aparatur pemerintahan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Geneng dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan *document* (dokumentasi). Metode analisis data menggunakan model interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi antar organisasi yaitu Kecamatan Gerih dan Geneng dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam pemilihan Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) telah dapat berjalan dengan baik dan optimal; (2) Sumber Daya dalam hal ini berupa sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan bantuan pangan non tunai sangat memadai, hal ini dapat diketahui dari jumlah E-Warong yang ada di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng sangat cukup, sehingga tidak terjadi penumpukan atau antrian KPM pada saat di E-Warong. (3) Disposisi sikap para pelaksana sudah optimal namun masih perlu adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif kepada masyarakat yang masih belum paham. (4) Bantuan Pangan Non Tunai dalam pelaksanaannya di lapangan telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi petugas di lapangan. Struktur organisasi yang menangani dan bertanggungjawab langsung terhadap keberhasilan bantuan pangan non tunai relatif efektif dan fleksibel sehingga memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Pangan, perlindungan sosial, Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is social food assistance in the form of non-cash from the government that is given to Beneficiary Families (KPM) every month through an electronic account mechanism that is used only to purchase foodstuffs at foodstuff traders / e-warong in collaboration with bank. Meanwhile, the purpose of this study was to determine the Implementation Model of Non-cash Food Assistance for Social Protection in Geneng and Gerih Districts, Ngawi Regency. In this study using the Participatory Action Research (PAR) method. The research object is Beneficiary Families (KPM) of Non-Tunia Food Assistance, while the research subjects are Government and society in Ngawi Regency, East Java, which is represented by government officials and communities in the Geneng and Gerih districts of Ngawi Regency. Data collection techniques used in this study were interviews (interviews), observation (observation), and documents (documentation). The data analysis method uses an interactive model. The research findings show that (1) Communication between organizations, namely Gerih and Geneng Districts with the Social Service of Ngawi Regency in the selection of Electronic Mutual Cooperation (E-Warong) Warung has been able to run well and optimally; (2) Resources in this case in the form of facilities and infrastructure to implement non-cash food assistance are very adequate. at E-Warong. (3) The attitude of the implementers has been optimal, but there is still a need for more intensive socialization and guidance to people who still do not understand. (4) In its implementation in the field, Non-Cash Food Assistance



is equipped with Standard Operating Procedures (SOP) as a guideline for officers in the field. The organizational structure that handles and indirectly responsible for the success of non-cash food assistance is relatively effective and flexible, thus facilitating supervision in its implementation.

Keywords: *Food, social protection, poverty alleviation*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi karena merupakan sumber energi untuk mempertahankan hidup. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UUD 1945. Oleh karenanya, sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya (Prabowo, 2010). Sejalan dengan itu sejarah perekonomian pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencatat dengan jelas bahwa pemimpin negara ini secara konsisten meletakkan ekonomi pangan sebagai sesuatu hal yang sangat strategis (Suryana 2008).

Kemiskinan dan Kerentanan Pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (Rastra) yang bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai.

Mulai tahun 2018, Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk nontunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra tetapi tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tahun 2019, Program BPNT terus diperluas ke kabupaten/kota yang pada tahun 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Untuk perluasan tahun 2019, pelaksanaan BPNT akan dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme. Pertama, menggunakan mekanisme yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kedua, menggunakan mekanisme khusus untuk wilayah kabupaten yang sesuai dengan



penilaian Tim Pengendali dan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. Agar pelaksanaan Program BPNT berjalan baik dan tercapai tujuannya, perlu adanya Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai yang disusun sebagai tuntunan, arahan, atau acuan pelaksanaan di lapangan. Pedoman Umum ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pelaksana program, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur BPNT, e-Warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya. Pedoman akan dilengkapi dengan Petunjuk Teknis untuk mekanisme yang lebih rinci.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT menjamin ketersediaan pangan sebagian dari beras yang dibutuhkan KPM. Rachman et al. (2018) menyatakan bahwa kontribusi BPNT dalam pemenuhan kebutuhan beras di lima kota. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi pendapatan, tingkat konsumsi semakin tinggi. Karena tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi besar atau mungkin pola hidup menjadi semakin konsumtif (Rahardja dan Manurung 2008). BPNT memberikan tambahan pendapatan kepada KPM, yang diduga memengaruhi perilaku KPM dalam menentukan jenis pangan yang akan dikonsumsi sehingga mengubah pola konsumsinya. Adanya perubahan pendapatan akan memberikan respons yang berbeda pada setiap rumah tangga dan berbeda pula pada setiap kelompok pangan yang akan dikonsumsi.

Rumah tangga miskin memiliki pendapatan yang rendah, akibatnya daya belinya juga rendah. Oleh karena itu rumah tangga miskin sangat memperhatikan harga dari pangan yang akan dikonsumsi. Harga menjadi faktor yang memengaruhi permintaan rumah tangga. Selain mempertimbangkan harga pangan yang akan dikonsumsi, rumah tangga juga mempertimbangkan harga pangan lain yang saling berhubungan (Rahardja dan Manurung 2008).

Jumlah rumah tangga juga mempengaruhi jumlah konsumsi pangan rumah tangga. Semakin bertambah jumlah anggota keluarga maka permintaan terhadap pangan umumnya akan bertambah. Faktor lain yang diduga memengaruhi pola permintaan pangan rumah tangga miskin adalah kepesertaan BPNT. Diduga terdapat perbedaan pola permintaan pangan antara rumah tangga BPNT dan rumah tangga non BPNT. Hal ini karena KPM BPNT tidak lagi mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras dan atau telur sedangkan rumah tangga non BPNT mengeluarkan uang untuk memperoleh beras dan atau telur.

Masalah yang timbul di beberapa daerah diantaranya masih terdapat masyarakat penerima kartu BPNT yang belum memasukkan saldo di dalam kartunya sehingga persoalannya terletak di bank penyalur bantuan social itu. Oleh sebab itu bank harus memperbaiki data penerima bantuan, sehingga masyarakat tidak cemas dengan permasalahan kartu yang belum terisi saldonya, maka Bank sebagai salah satu



penyalur bantuan harus segera memperbaiki data-data yang ada, supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kartu bantuan social dari pemerintah tersebut.

Selain hal di atas masih terdapat masalah pergantian data penerima BPNT bagi masyarakat yang sudah tidak lagi menjadi indikator penerima bantuan karena sudah berhasil dan sukses secara ekonomi ternyata masih mendapatkan bantuan soaial dari pemerintah hal ini menjadi masalah tersendiri. Karena pergantian data tersebut terkendala lamanya update data dari pusat yang hanya setiap enam bulan sekali. Ini menjadi permasalahan di masyarakat, karena masih menerima bantuan, ketika sudah coret dari penerima PBNT dan ingin diberikan ke orang lain atau yang anтре di bawahnya mengalami kendala yang lama dalam perubahan datanya.

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana model Implementasi Bantuan Pangan Nontunai Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kecamatan Geneng Dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model Implementasi Bantuan Pangan Nontunai Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kecamatan Geneng Dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

METODE

Capaian dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), menurut Agus Afandi (2014) penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam capaian dan tahapan penelitian diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan: Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti.
2. Merumuskan masalah: Dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti.
3. Mengadakan studi pendahuluan: Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan dan studi lapangan.



4. Menentukan sampel penelitian: Padatahap ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan obyek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel.
5. Menyusun rencana penelitian: Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian.

Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2012:13), “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Lokasi dan objek penelitian di kawasan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang mewakili/mencerminkan masyarakat Jawa Timur bagian barat ditinjau dari aspek masyarakat dengan cultur tradisional dan industri, pertanian dan perkebunan.

Sampel dan Responden Penelitian

Pendapat Gay dan Diehl (1992) ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Pengambilan sampel menggunakan tehnik *multi stage sampling*. Obyek penelitian adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunia sedangkan subyek penelitiannya adalah Pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Ngawi Jawa timur, yang diwakili oleh aparatur pemerintahan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Geneng dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Selanjutnya diambil sebagian untuk dijadikan sampel/responden penelitian secara “*Purposive Sampling*”. Pengertian teknik purposive sampling menurut Arikunto (2006) adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Juliansyah Noor (2011:138). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan *document* (dokumentasi). Sedangkan untuk menguji keabsahan data adalah menggunakan Triangulasi sumber data.

Metode Analisis Penelitian

Metode analisis data menggunakan model interaktif. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman dalam Moleong (2007), menjelaskan bahwa dalam melakukan proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatancatatan tertulis di lapangan hingga laporan akhir lengkap tersusun.



2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun agar dapat memberi kemungkinan dapat menarik kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu berupa intisari dari penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian.

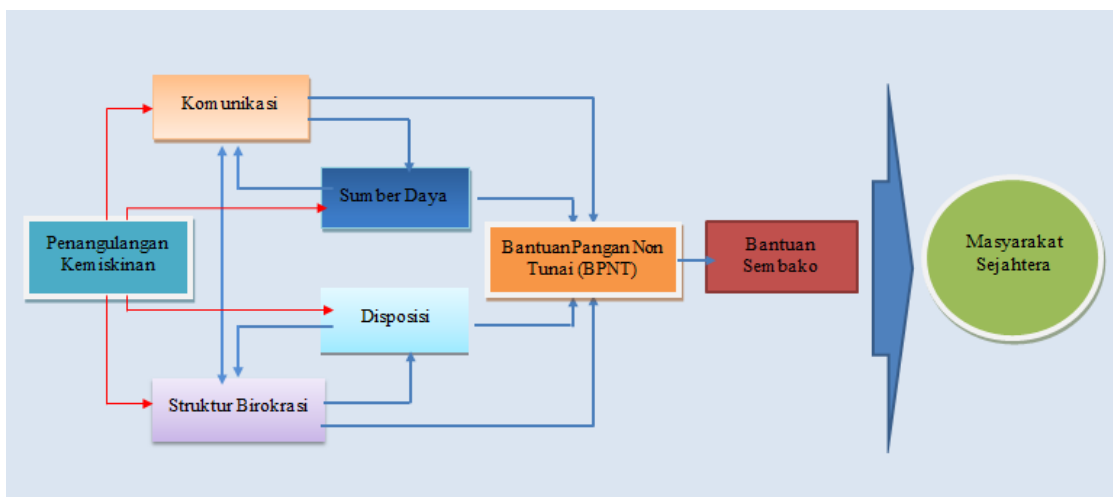
HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Pangan Nontunai pada tahun 2019, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme. Pertama, menggunakan mekanisme yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kedua, menggunakan mekanisme khusus untuk wilayah kabupaten yang sesuai dengan penilaian Tim Pengendali dan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu diantara Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang menerima manfaat dari Bantuan Pangan Nontunai. Pelaksanaan program BPNT sepanjang tahun 2018 sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan kepuasannya pada proses pelaksanaannya sedangkan pengelola Ewarong juga menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Dari indikator penelitian menunjukkan bahwa KPM dan E-warong sama-sama merasakan bahwa kegiatan Program BPNT tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi sangat mudah dimengerti serta nyaman, sehingga baik KPM maupun E-warong merasakan manfaatnya secara positif dari pelaksanaan BPNT yang baru pertama kali dilakukan sebagai pengganti program Keluarga Beras Sejahtera.

Sesuai dengan judul dalam penelitian yaitu Model Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penulis merumuskan Model implementasi Program Bantuan Non Tunai di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Model Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tahun 2019 yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan public menurut George C. Edward III. Ada ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Model Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tahun 2019 dapat diliha pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

Model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dapat dijelaskan berikut dibawah ini.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri (Widodo, 2011:97).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Pentingnya kerjasama dan komunikasi antar organisasi adalah untuk mencapai tujuan dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari suatu kebijakan. Kerjasama dan komunikasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan dua hal ini dapat menjadikan sebuah kebijakan



berjalan efektif tatkala terdapat sebuah kerjasama dapat berjalan secara bersamaan. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara kurang baik, melainkan karena kebijaksanaan itu sendiri memang belum terarah. Penyebab dari semua ini tidak lain karena kebijaksanaan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya. Kebijakankebijakan yang berhubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai maka semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya (Nugroho, 2004:34).

Berdasarkan hasil kajian serta hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait Bantuan Pangan Non Tunai dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi yaitu Kecamatan Gerih dan Geneng dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam pemilihan Elektronik Warung Gotong Royong (EWarong) telah dapat berjalan dengan baik dan optimal. Masyarakat telah mengetahui keberadaan E-Warong sebagai tempat untuk memanfaatkan bantuan pangan non tunai. Masyarakat juga sudah mengetahui media atau alat untuk mendapatkan bantuan sembako yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam hal pengambilan bantuan pangan non tunai tidak terjadi penumpukan atau antrian yang panjang.

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Sumber Daya dalam implementasi bantuan pangan non tunai dalam penelitian ini meliputi sarana dan prasarana penunjang program kegiatan. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam hal sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bantuan pangan non tunai adalah melalui E-Warong,

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai saat ini sangat memadai. Jumlah E-Warong di Kecamatan Gerih maupun Kecamatan Geneng lebih



dari cukup untuk melayani masyarakat Penerima manfaat Program Sembako yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sarana dan prasarana untuk menjalankan kebijakan ini sangat memadai, jumlah EWarong yang ada di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan kebijakan ini sangat cukup. Selanjutnya hal senada juga diungkapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gerih, beliau mengatakan: “Kita sebagai pelaksana merasa tenang, nyaman dan senang, karena tidak kekurangan untuk hal sarana dan prasarana. E-Warong yang ada di Kecamatan Gerih mampu melayani semua penerima pemanfaat bantuan pangan non tunai.

Penulis menganalisa hasil dari wawancara di atas, diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana semua informan memberikan tanggapan yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:100) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan itu menunjang keberhasilan kebijakan, yang harus ditegaskan adalah sumber daya yang cukup dan terpakai atau bermanfaat sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu kecenderungan para pelaksana menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Sikap para implementor sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan kita harus bisa melihat seberapa besar kekuasaan dari pembuat kebijakan dan pelaksana program kebijakan sehingga semakin jelas tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja jika semakin besar kepentingan yang mempengaruhi maka akan sedikit susah untuk mengimplementasikan kebijakan. Selain itu seorang implementor harus bisa merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.



Kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Maka gambaran komitmen dan kejujuran sangat diperlukan untuk melihat konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan agen yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa disposisi atau sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Program Sosial Bantuan Sembako melalui E-Warong sudah sesuai dengan kebijakan. Kemampuan para pelaksana untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini sudah optimal. Sikap inilah yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Geneng, beliau mengatakan: “bantuan pangan non tunai yang disalurkan melalui E-Warong dalam melayani KPM cukup baik. Kita selalu memberikan arahan kepada KPM yang belum paham terhadap mekanisme transaksi yang dilakukan di E-Warong. Kami selalu berusaha memberi pendampingan kepada KPM yang belum mengerti, sehingga KPM tidak merasakan kesulitan untuk mendapatkan bantuan ini dan senang telah dibantu sembako oleh pemerintah”.

Hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum petugas yang menjalankan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong sudah dirasakan baik oleh masyarakat penerima bantuan dan pemilik E-Warong. Namun masyarakat masih perlu pendampingan dari petugas ketika melakukan transaksi di E-Warong. Sehingga penulis dapat mengkategorikan disposisi sikap para pelaksana sudah optimal namun masih perlu adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif kepada masyarakat yang masih belum paham.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Bantuan Pangan Non Tunai dalam implementasinya dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi petugas di lapangan. Selain sebagai pedoman bagi tugas untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada KPM, SOP ini juga selalu disosialisasi kepada KPM agar mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran sembako yang benar. Struktur organisasi yang



menangani dan bertanggungjawab langsung terhadap keberhasilan bantuan pangan non tunai relatif efektif dan fleksibel sehingga memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya

Berdasarkan wawancara dengan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, mengatakan bahwa “bantuan pangan non tunai dalam implementasinya di lapangan di bekali dengan SOP, hal ini tentu memudahkan bagi kami para petugas di lapangan untuk mensukseskan program sosial bantuan sembako kepada KPM”.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang Model Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kecamatan Geneng Dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa (1) Komunikasi antar organisasi yaitu Kecamatan Gerih dan Geneng dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam pemilihan Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) telah dapat berjalan dengan baik dan optimal. Masyarakat telah mengetahui keberadaan E-Warong sebagai tempat untuk memanfaatkan bantuan pangan non tunai. Masyarakat juga sudah mengetahui media atau alat untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (2) Sumber Daya dalam hal ini berupa sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan bantuan pangan non tunai sangat memadai, hal ini dapat diketahui dari jumlah E-Warong yang ada di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng sangat cukup, sehingga tidak terjadi penumpukan atau antrian KPM pada saat di E-Warong. (3) Secara umum petugas yang menjalankan kebijakan bantuan pangan non tunai melalui E-Warong sudah dirasakan baik oleh masyarakat penerima bantuan dan pemilik E-Warong. Namun masyarakat masih perlu pendampingan dari petugas ketika melakukan transaksi di E-Warong. Sehingga penulis dapat mengkategorikan disposisi sikap para pelaksana sudah optimal namun masih perlu adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif kepada masyarakat yang masih belum paham. (4) Bantuan Pangan Non Tunai dalam pelaksanaannya di lapangan telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi petugas di lapangan. Selain sebagai pedoman bagi petugas untuk mengimplementasikan bantuan pangan non tunai kepada KPM, SOP juga selalu disosialisasi kepada KPM agar mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran sembako. Disamping itu struktur organisasi yang menangani dan bertanggungjawab langsung terhadap keberhasilan bantuan pangan non tunai relatif efektif dan fleksibel sehingga memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Implementasi BPNT agar ke depan dapat lebih efektif menanggulangi kemiskinan pada masyarakat, hendaknya program BPNT perlu dilanjutkan oleh pemerintah karena memberikan pengaruh signifikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin yaitu bahan pokok kebutuhan dasar hidup seperti beras, gula, telur dan lain sebagainya. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan sinergi



antara program bantuan pangan, dimana bantuan pangan ini tidak untuk membeli kebutuhan diluar kebutuhan pangan pokok seperti rokok.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Afandi, Agus. 2014. *Modul Participatory Action Research (PAR), Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya :Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel.
- Agus Wiyaka, Endang Murti. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih Dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018*. Seminar Nasional Sistem Informasi 2019. 19 September 2019 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang.
- Agus Wiyaka, Endang Murti. 2017. *Model of Rastra Program in the Framework of Social Protection of Pre-Prosperous Society in Kendal District*. Gerih and Kwadungan of Ngawi Regency Journal International Developing Country Studies www.iiste.org ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.7, No.9,
- Anderson, J, (1978). *Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan*. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood. Cliffs.
- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992). *Research Methods for Business and Management*. MacMillan Publishing Company, New York
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- M.Irfan Islami, 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Maret 2018, Jakarta
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.



Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Cetakan Pertama, Nopember, 2017.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016

Prabowo, Rossi. 2010. “*Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*”, Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, Vol. 6 No. 2. Jakarta, 62

Prathama Rahardja, Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFEUI

Riant, Nugroho D. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

Scott, Z. (2012). *Topic Guide on Social Protection*. Birmingham: Governance and Social Development Resource Center. Social Assistance as an Economic Investment for Indonesia, presented in Social Protection Knowledge Collaboration Event 1: Maximising Growth -Making Sure Everyone Benefits

Solichin, Abdul Wahab, 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subarsono, AG, 2010. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustak Pelajar.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2005b). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suryana. 2008. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Sukses, Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1973). *The policy implementation process a conceptual framework in administration and society*. Beverly Hills: Sage Publication.

Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.